DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan pertama, PSH FH UlI, Yogyakarta, 2005.

Busrizalti, *Hukum Pemerintah Daerah: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.

I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, edisi revisi, Setara Press, Malang, 2010.

Jazim Hamidi, et.al, *Teori dan Hukum Perancangan Peraturan Daerah*, UB Press, Malang, 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, cetakan kesatu, Kencana, Jakarta, 2016.

King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang – undangan dan Aspek*

Pengujiannya, cetakanpertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2017. Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012.

M. Effendi, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian atas Desentralisasi*, Otonomi, dan Legislasi Daerah, Prenadamedia, Jakarta, 2021.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, cetakan keenam, Kanisius, Yogyakarta, 2021.

Moenta Pangerang dan Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Prasada, Makassar, 2017.

Muhammad Hussain Haekal, *al-Hukumah al-Islamiyah*, Dar al-Ma‟arif, Mesir, 2018.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2015.

Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi*, Mizan, Bandung, 2009.

Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogykarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2013.

Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jala Pertama Aksara, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan keduabelas, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan, dan Ketaatan*, FH UII Press, Jogjakarta, 2020.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Sarman dan Mohammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Sirajudi, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah : Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.

Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soehino, *Ilmu Negara*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode,* cetakan pertama, Setara Press, Malang, 2013.

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.

Tim Visi Yustisia, *UUD Negara Republik Indonesia 1945*, Visimedia, Jakarta, 2014.

Yusnaini Hasyimzoem, *et.al*, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, cetakan pertama,Setara Press, Malang, 2016.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

JURNAL

Alfi Rosdiyanti dan Erlina, "Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)", *Jurnal Hukum Badamai*, Edisi Vol. 09 No. 01, 2024.

Aldila Putri Larus dan Fahmi Ulin Ni'mah "Sistem Pelayanan Penerbitan Izin Berusaha melalui OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Publik*, Edisi Vol. 19 No. 01. 2025.

Arifian Ardiata dan R. Widodo Triputro, "Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan D.I. Pandjaitan Kawasan Sumbu Filosofis", *Jurnal Social and Government*, Edisi Vol. 4 No. 2, 2023.

Della Puspitawati, dkk, "Identifikasi Penggunaan Trotoar oleh Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang Jakarta", *Jurnal TALENTA Conference Series: Energy & Engineering (EE)*, Edisi Vol. 05 No. 01, 2022.

Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, "Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi Vol. 11 No. 22, 2020.

Dikki Ahadiyat Muttakin, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya", *Jurnal Ilmiah Imu Administrasi Negara*, Edisi Bol. 07 No. 01, 2020.

Dola Riza, "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi Vol. 03 No. 01, 2018.

Eka Nam Sihombing, "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah", *Jurnal Yudisial*, Edisi Vol. 10 No. 2, 2017.

Evi Noviawati, "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Unigal*, Edisi Vol. 06 No. 01, 2018.

Fuji Puspita Rahaya, *et. al* "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda", *Jurnal Administrasi Publik*, Edisi Vol. 09 No. 02, 2021.

Gelar Faruq dan Tirton Nefianto, “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang”, *Jurnal Res Publica*, Edisi Vol. 01. No. 01, 2022.

Haerni Susiani, “Fungsi Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban PKL di Bandar Lampung), *Jurnal Fiat Justisia*,Edisi Vol. 10 No. 01, 2016.

Helmi, “Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme”, *Undang:Junral Hukum*, Edisi Vol. 04 No. 02, 2021.

Kartini Maharani Abdul dan Yunita Kurniasari Sirajudin, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Edisi Vol. 12 No. 1, 2022.

Luqmanul Hakim, “Politik Hukum Otonomi Khusus: Dualitas Peraturan Pertanahan di Yogyakarta”, *Jurnal of Islamic Studies and History*, Edisi Vol. 03 No. 01, 2025.

Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Vol. 10 No. 19, 2014.

Nasrun, *et al.*, “Kedudukan Peraturan Daerah yang Dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015”, *Syaih Kuala Law Journal*, Edisi Vol. 03 No. 01, 2019.

Nuni Trianingrum dan Jawade Hafidz, “Model Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

(SATPOL PP) Berbasis Pemberdayaan Pertisipatif di Kabupaten Batang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Edisi Vol. 12 No. 01, 2017.

Ressa Fitriana, *et. al*, "Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif", *Jurnal Governansi*, Edisi Vol. 06 No. 02, 2020.

Rommy Patra, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Tanjungpura Law Journal*, Edisi Vol. 02 No. 01, 2018.

Ropiko Dur, *et.al*., "Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan", *Jurnal Inovasi Kebijakan*, Edisi Vol. 08 No. 02, 2023.

Rusnan Sofwan, "Pentingnya Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah", *Jurnal Diskresi*, Edisi Vol. 01 No. 01, 2022.

Selvi Rahmawati, et,all, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi", *Jurnal Media Ilmu*, Edisi Vol. 04 No. 02, 2025.

Syarah Syam Amir, *et.al*, "Implikasi yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Bebasis Risiko", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Edisi Vol. 14 No. 01, 2022.

Tobirin, *et,al*, "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)", *Jurnal Of Social and Economics Research (JSER)*, Edisi Vol. 06 No. 01, 2024.

Utang Risidi, dkk, "Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah", *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Edisi Vol. 04 No. 01, 2025.

Wicaksono, et al., "Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi Vol. 11 No.02, 2020.

Yayat Sujatna, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Vol. 03 No. 02, 2018.

Yeni Rosdianti, "Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Edisi Vol. 7 No. 7, 2021.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hirarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi Vol. 09 No. 01, 2018.

KARYA ILMIAH

Afifah Dyan Nurlaili, "Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Relokasi PKL Alun-Alun Purbalingga)", *Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Dian Kus Pratiwi dan Mazdan Maftukha Assyayuti, "Urgensi Kajian Evaluasi Produk Hukum Daerah Terhadap Efektivitas Pembentukan Produk Hukum di Daerah", *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,* 2024.

Harsanto, “Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta”, *Skripsi,* 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima.

DATA ELEKTRONIK

Akurat, “Yogyakarta Pamer Penataan PKL kepada Batam,” *Akurat*, dimuat dalam: https://www.akurat.co/rill/1301941950/Yogyakarta-Pamer-Penataan-PKL-kepada-Batam.

Alfi Annisa Karin "PKL dan Parkir Liar Marak di Kotabaru, Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan: Bakal Kami Tata," *Harian Jogja*, dimuat dalam: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/21/510/1204944/pkl-dan-parkir-liar-marak-di-kotabaru-wakil-wali-kota-jogja-wawan-harmawan-bakal-kami-tata.

Alfi Annisa Karin "Sithik Edhing, PKL Naik Kelas, Pedagang di Jalan Hayam Wuruk Didorong Punya NIB dan Sertifikasi Halal," *Radar Jogja*, dimuat dalam: https://radarjogja.jawapos.com/politik/652954909/sithik-edhing-pkl-naik-kelas-pedagang-di-jalan-hayam-wuruk-didorong-punya-nib-dan-sertifikasi-halal.

Diskopum Kabupaten Jember, "UU Cipta Kerja Kasih Perlindungan Hukum Lebih Buat UMKM?," dimuat dalam: https://diskopum.jemberkab.go.id/posts/uu-cipta-kerja-kasih-perlindungan-hukum-lebih-buat-umkm.

Info Hukum, "Apa Itu Peraturan Daerah?," diakses 4 April 2026. Catatan: saya belum bisa memverifikasi URL pasti artikel ini dari data web yang terbaca, jadi untuk skripsi sebaiknya Anda cek ulang alamat halamannya sebelum final.

Iwan Nurwanto "Wisatawan Keluhkan Polusi Asap, Satpol PP Tertibkan Pedagang Sate di Malioboro," *Radar Jogja*, dimuat dalam: https://radarjogja.jawapos.com/jogja/2512310006/wisatawan-keluhkan-polusi-asap-satpol-pp-tertibkan-pedagang-sate-di-malioboro.

Portal Pemerintah Kota Yogyakarta, "Pemkot Tata 10.000 PKL," dimuat dalam: https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6027/Pemkot-Tata-10000-PKL.

SUMBER LAIN

Wawancara dengan Dodi Kurnianti, S.Stp., M.Si Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Muh. Ari Wardani, S.H, Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kota Yogyakarta.